



**KINERJA PEMERINTAH DAERAH PROPINSI BANTEN: PERSPEKTIF PENDAPATAN ASLI
DAERAH DAN TEMUAN AUDIT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN INDONESIA**

Suheri

Fakultas Ekonomi, Universitas Pramita Indonesia
suheri_unpri@unpri.ac.id

Yoyok Cahyono

Fakultas Ekonomi, Universitas Pramita Indonesia
yoyok_cahyono@unpri.ac.id

Dabella Yunia

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Dabellayunia@untirta.ac.id

Abstract

This study aimed to examine the influence of local revenues (seen from the number of PAD), and audit findings on the performance of local government. This research was conducted in the District and City of Banten Province. This study used purposive sampling with the amount of data 6 local governments that resulted from the Supreme Audit Agency (BPK), the Department of Revenue and Fiscal Management (DPPKD), and <http://otda.kemendagri.go.id>. The data in this study were processed using IBM software Statistical Package For Social Science (SPSS) version 20.0. These results indicate that revenue is measured by the amount of revenue does not have an influence on local government performance as measured by performance scores. And audit findings are measured through the number of audit findings (in rupiah) divided by the total budget has no effect on the performance of local government.

Keywords: PAD, audit findings, the performance of local government.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan lokal (dilihat dari jumlah PAD), dan temuan audit terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten dan Kota Provinsi Banten. Penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan jumlah data 6 pemerintah daerah yang dihasilkan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Departemen Pendapatan dan Manajemen Fiskal (DPPKD), dan <http://otda.kemendagri.go.id>. Data dalam penelitian ini diproses menggunakan perangkat lunak IBM Paket Statistik Untuk Ilmu Sosial (SPSS) versi 20.0. Hasil ini menunjukkan bahwa pendapatan diukur dengan jumlah pendapatan tidak memiliki pengaruh pada kinerja pemerintah daerah yang diukur dengan skor kinerja. Dan temuan audit diukur melalui jumlah temuan audit (dalam rupiah) dibagi dengan total anggaran tidak berpengaruh pada kinerja pemerintah daerah.

Kata kunci: (PAD), temuan audit, kinerja pemerintah daerah.

PENDAHULUAN

Republik Indonesia saat ini sedang memasuki masa pemulihan akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan, dampak dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia tersebut terlihat pada sektor swasta seperti pasar modal dan pada sektor publik (pemerintah). Berbagai dampak negatif seperti bertambahnya pengangguran dan peningkatan kemiskinan

bermunculan, pengaruh negatif krisismometer juga terjadi pada APBN yang pada gilirannya berdampak pula pada APBD. Sektor pendapatan sangat labil atau faktor ketidakpastian akan penerimaan dari Pemerintah pusat menjadi lebih tinggi, kondisi tersebut lebih memperhatikan pada daerah yang Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah. Dengan PAD yang rendah berarti ketergantungan kepada pemerintah pusat lebih tinggi.

Pajak dan retribusi daerah yang menjadi komponen utama dari PAD juga terpengaruh akibat terjadinya krisis ekonomi. Menurunnya aktivitas ekonomi masyarakat akibat adanya krisis ekonomi menyebabkan terganggunya penerimaan masyarakat yang kemudian mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah yang mengakibatkan pendapatan daerah menjadi lebih rendah dan tidak menentu. Dengan keadaan pemerintah yang mengalami tekanan keuangan mengakibatkan penyusunan APBD menjadi tidak pasti sehingga menyebabkan kemungkinan adanya pergeseran pada komponen-komponen pendapatan dan belanja daerah.

Seluruh pihak termasuk pemerintah sendiri mencoba mengatasi hal ini dengan melakukan reformasi di segala bidang. Salah satu usaha memulihkan kondisi ekonomi, sosial dan politik adalah dengan mengembalikan kepercayaan rakyat kepada pemerintah dengan mencoba mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Awal mula pengalihan kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah disebabkan karena faktor krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia.

Pengalihan kewenangan tersebut bertujuan agar kelak pemerintah daerah dapat membiayai pembangunan daerah dan pelayanan publik dengan pengelolaan keuangannya sendiri. Minimalisir campur tangan pemerintah pusat dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah diharapkan dapat mengembangkan potensi daerah. Hal ini mendorong pendelegasian sebagian wewenang pemerintah pusat untuk pengelolaan keuangan kepada daerah, agar daerah mampu untuk membiayai pembangunan dan pelayanan atas dasar keuangan sendiri.

Selain hal tersebut, pemerintah daerah ingin memberikan pelayanan yang lebih berorientasi pada kepuasan masyarakat serta kebutuhan dan keinginan rakyat mengenai kinerja pemerintah daerah semakin besar dan kritis, terutama semenjak era reformasi yang melahirkan ketetapan MPR yaitu TAP MPR nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan, keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah negara, sehubungan dengan tujuan otonomi daerah, yaitu menuntut kemandirian daerah maka upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pendanaan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah dengan meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus mampu menyelenggarakan pemerintahannya agar tercipta tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Sistem evaluasi, monitoring, dan pengukuran kinerja yang sistematis guna mengukur

kemajuan yang dicapai pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu juga perlu diterapkan. Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap kinerja pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten?
2. Apakah terdapat pengaruh Temuan Audit BPK terhadap kinerja pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten?

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori utama yang mendasari penelitian mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan temuan audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah dijelaskan melalui perspektif teori agensi. Jensen dan Meckling (1976) menggambarkan adanya hubungan kerja antara pemilik (*principal*) dengan manajemen (agen). Adanya pemisahan kepemilikan oleh *principal* dengan pengendalian oleh agen dalam sebuah organisasi cenderung menimbulkan konflik keagenan diantara *principal* dan agen (Jensen dan Meckling, 1976). Di satu sisi, agen secara moral bertanggung jawab mengoptimalkan keuntungan *principal*, namun di sisi lain manajemen juga berkepentingan memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri. Sehingga cenderung menimbulkan masalah agensi. Diakui atau tidak di Pemerintahan Daerah terdapat hubungan dan masalah keagenan, khususnya hubungan eksekutif dan legislatif yang pada gilirannya dengan teori keagenan.

Teori yang menjelaskan hubungan prinsipal dan agen ini salah satunya berakar pada teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Teori prinsipal-agen menganalisis susunan kontraktual di antara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak (*principal*) membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit, dengan pihak lain (*agent*) dengan harapan bahwa agen akan bertindak/melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh prinsipal (dalam hal ini terjadi pendelegasian wewenang). Lupia & McCubbins (2000) menyatakan pendelegasian terjadi ketika seseorang atau satu kelompok orang (*prinsipal*) memilih orang atau kelompok lain (*agent*) untuk bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal.

Teori keagenan merupakan salah satu dasar dalam ilmu anggaran dan akuntansi. Analisis hubungan dan masalah keagenan di Pemerintahan Daerah tidak pelak lagi merupakan sebuah peluang penelitian masalah anggaran dan akuntansi. Ide-ide penelitian di bidang ini dapat mencakup dari keakurasian anggaran hingga pada analisis angka-angka laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Akuntabilitas

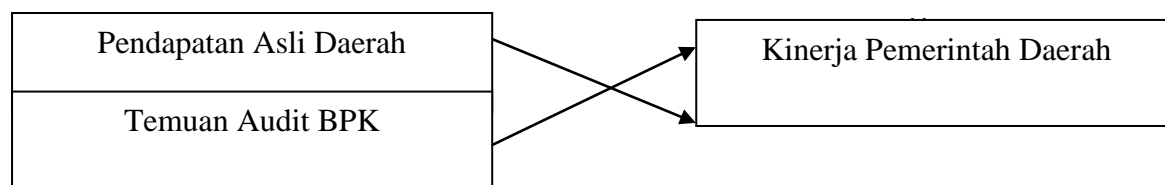
Dalam konteks organisasi pemerintah sering ada istilah akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah baik pusat maupun daerah harus bisa menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik. Salah satu elemen penopang akuntabilitas adalah transparansi. Transparansi digambarkan sebagai "ketersediaan informasi kepada publik atas transaksi pemerintah dan proses pengambilan keputusan, dan merupakan dasar untuk manajemen di semua negara demokrasi". Transparansi berarti bahwa individu, grup, atau organisasi dalam hubungan akuntabilitas diarahkan tanpa adanya kebohongan atau motivasi

yang tersembunyi, dan bahwa seluruh informasi kinerja lengkap dan tidak memiliki tujuan menghilangkan data yang memiliki hubungan dengan masalah tertentu.

Kerangka Pemikiran Teoritis

Variabel Independen

Variabel Dependen



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Teoritis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Pemda Kabupaten/Kota

Jumlah dan kenaikan kontribusi PAD akan sangat berperan dalam kemandirian pemerintah daerah yang dapat dikatakan sebagai kinerja pemerintah daerah (Florida, 2007 dalam Nugroho, 2012). Sumarjo (2010) juga menjelaskan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan faktor pendukung dari kinerja ekonomi makro.

Pertumbuhan yang positif mendorong adanya investasi sehingga secara bersamaan investasi tersebut akan mendorong adanya perbaikan infrastruktur daerah. Infrastruktur daerah yang baik serta investasi yang tinggi di suatu daerah akan meningkatkan PAD Pemda tersebut. [(Adi (2006) dalam Sumarjo (2010))] menyebutkan bahwa peningkatan PAD seharusnya didukung dengan peningkatan kualitas layanan publik. Dimana kualitas layanan publik yang baik akan mencerminkan kinerja yang baik suatu Pemda. Berdasarkan literatur yang diuraikan, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

H1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja Pemda kabupaten/kota.

Pengaruh Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemda Kabupaten/Kota

Temuan audit BPK merupakan kasus-kasus yang ditemukan BPK terhadap laporan keuangan Pemda atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan pengendalian intern maupun terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Semakin banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Pemda menggambarkan semakin buruknya kinerja Pemda tersebut.

Hal ini dipertegas oleh hasil penelitian Mustikarini dan Fitriyani (2012) sendiri yang hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa temuan audit berpengaruh negatif terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota. Dengan demikian, hipotesis terakhir penelitian ini adalah semakin banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Pemda menggambarkan semakin buruknya kinerja Pemda tersebut. Dengan kata lain, semakin tinggi angka temuan audit, maka menunjukkan semakin rendahnya kinerja suatu Pemda (Mustikarini dan Fitriyani 2012). Berdasarkan literatur yang diuraikan, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

H2 : Temuan audit BPK berpengaruh negatif terhadap kinerja Pemda kabupaten/kota.

METODE PENELITIAN

Pendapatan Asli Daerah

Pembangunan ekonomi suatu daerah membutuhkan sejumlah dana yang diperoleh atau berasal dari berbagai sumber yang dikelola oleh daerah. Dalam otonomi daerah

pembangunan ekonomi suatu daerah dilakukan berdasarkan kemampuan pendapatan daerah, karena hak atas pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah dan pembangunan ekonomi di daerah, telah diserahkan secara otonom kepada pemerintah daerah yaitu pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

Pendapatan asli daerah dapat diartikan sebagai pendapatan yang bersumber dari pungutan-pungutan yang dilaksanakan oleh daerah berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku yang dapat dikenakan kepada setiap orang atau badan usaha milik pemerintah maupun swasta, karena perolehan jasa yang diberikan pemerintah daerah tersebut maka daerah dapat melaksanakan pungutan dalam bentuk penerimaan pajak, retribusi dan penerimaan lainnya yang sah yang diatur dalam undang-undang. Menurut UU No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Temuan Audit

Temuan audit BPK yaitu berupa hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang mengungkapkan adanya pelanggaran atas ketidakpatuhan atas ketentuan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan ini dapat mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Dimana semakin banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pemda menggambarkan semakin buruknya kinerja pemda tersebut.

Hasil dari pemeriksaan yang dilakukan BPK tersebut berupa opini, temuan, kesimpulan atau dalam bentuk rekomendasi. Penelitian yang menghubungkan temuan audit dengan kinerja pemerintah daerah pernah dilakukan oleh Mustikarini dan Fitriyani (2012) yang menghasilkan bahwa semakin besar jumlah temuan audit BPK pada suatu pemerintah daerah maka semakin rendah kinerja pemerintah daerah itu.

Variabel temuan audit BPK penelitian ini menggunakan rumus :

$$\text{Temuan Audit} = \frac{\text{Temuan Audit (dalam rupiah)}}{\text{Total Anggaran Belanja}}$$

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)

Kinerja adalah sesuatu yang dicapai atau prestasi yang diperlihatkan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001). Menurut Stephen P Robbin (1994), kinerja adalah ukuran hasil kerja yang dilakukan dengan menggunakan kriteria yang disetujui bersama. Pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah proses pengawasan secara terus menerus dan pelaporan capaian kegiatan, khususnya kemajuan atas tujuan yang direncanakan (Westin, 1998 dalam Sumarjo, 2010). Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2008 (PP No.6/2008) tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa salah satu evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah berupa Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). Untuk melengkapi PP No.6/2008, maka diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.73 Tahun 2009 (Permendagri No.73/2009). Yang menyebutkan bahwa salah satu evaluasi kinerja yang dilakukan Pemerintah terhadap

Pemda berupa evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD) yang menggunakan LPPD sebagai sumber informasi utama.

EKPPD adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja. Sistem pengukuran kinerja adalah sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah Pemerintah kota atau kabupaten yang ada di Provinsi Banten. Total populasi adalah 8 yang terdiri dari 4 kota dan 4 kabupaten yang berpusat di OPD Provinsi Banten tahun 2009 s/d 2017.

Sampel dalam penelitian ini adalah Pemerintah daerah dalam wilayah Kabupaten/Kota di Banten yang telah mempublikasikan laporan keuangan daerah dan laporan kinerja pemerintah daerah serta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada tahun anggaran 2009 - 2017. Penentuan sampel dalam penelitian ini adalah supaya diperoleh sampel yang representatif, sesuai dengan tujuan penelitian.

Metode Analisis

Analisis Persamaan Regresi Berganda

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y) serta mengukur hubungannya. Persamaan regresi linear berganda.

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

dimana :

Y : Variabel Dependen (Kinerja Pemerintah Daerah)

X1 : Pendapatan Asli Daerah

X2 : Temuan Audit BPK

a : Konstanta

β : Koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan atau penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen. Bila b(+) maka naik, dan b(-) maka terjadi penurunan.

e : Standar Error

Analisis Regresi Logistik Ordinal (PLUM)

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi logistik ordinal atau PLUM (*Polytomous Universal Model*). Regresi logistik ordinal bertujuan untuk memprediksi kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Regresi logistik ordinal adalah perluasan dari multinomial logistik regresi, yaitu regresi yang dipakai jika variabel dependen berupa kategori ordinal (peringkat). Dalam penelitian ini, variabel dependen berupa range nilai 0-4 dari skor kinerja Pemda kabupaten/kota. Kategori pertama yaitu Pemda dengan skor 0 – 0,999 = 1 rendah, kategori kedua Pemda dengan skor 1 – 1,999 = 2 sedang, kategori ketiga Pemda dengan skor 2 – 2,999 = 3 tinggi dan kategori keempat Pemda dengan skor 3 - 4 = 4 sangat tinggi.

JENIS DAN SUMBER DATA

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Banten, serta data kuantitatif yang diperoleh dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Provinsi Banten, serta instansi terkait lainnya. Selain itu sumber data juga diperoleh dari akses internet dengan situs : <http://otda.kemendagri.go.id>

2. Jenis Data

Data yang digunakan adalah data tahun 2009 - 2017. Dimana data tersebut meliputi data keuangan APBD di Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten, dan data temuan audit BPK Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten, serta data skor kinerja pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Banten.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian. Hasil analisis deskriptif dengan menggunakan SPSS 20.00 dari variabel - variabel penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel1.
Analisis Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	24	500680000 00	5036710000 00	1855296250 00,00	1329886172 87,938
Temuan	24	,02	8,63	3,4067	2,54542
KPD	24	2	4	3,00	,511
Valid N (listwise)	24				

Sumber :Data sekunder yang diolah (2018)

Berdasarkan gambar Tabel 4.2 diatas dapat dideskripsikan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Minimum adalah nilai terkecil dari suatu rangkaian pengamatan, maksimum adalah nilai terbesar dari suatu rangkaian pengamatan, mean (rata-rata) adalah hasil penjumlahan nilai seluruh data dibagi dengan banyaknya data, sementara standar deviasi adalah akar dari jumlah kuadrat dari selisih nilai data dengan rata-rata dibagi dengan banyaknya data.

Berdasarkan Tabel 4.2 diatas hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif pada variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan nilai minimum sebesar Rp 50.068.000.000, dan nilai maksimum sebesar Rp 503.671.000.000, dan nilai rata-rata sebesar Rp 185.529.625.000, serta standar deviasi sebesar Rp 13.298.8617.287,938. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang paling rendah, yang dinilai dari total pendapatan asli daerahnya sebesar Rp 50.068.000.000 yaitu terdapat pada Pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang pada tahun 2011, dan yang paling besar adalah Rp 503.671.000.000 yaitu yang terdapat pada Pemerintah daerah Kabupaten Tangerang tahun 2012.

Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap variabel temuan audit menunjukkan nilai minimum sebesar 0.02, dan nilai maksimum sebesar 8.63, serta nilai rata-rata sebesar 3.4067, dengan standar deviasi sebesar 2.54542. Hal ini menunjukkan bahwa temuan audit yang diberikan oleh BPK paling rendah nilainya sebesar 0.02 yaitu yang terdapat pada Pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang tahun 2010 dan yang paling besar nilainya adalah 8,63, yaitu terdapat pada Pemerintah daerah Kabupaten Tangerang tahun 2009 dengan standar deviasi sebesar 2.54542.

Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap variabel Kinerja Pemerintah daerah memiliki nilai minimum sebesar 2, dan nilai maksimum sebesar 4, dan nilai rata-rata sebesar 3.00, serta standar deviasi sebesar 0.511. Hal ini menunjukkan tingkat pengungkapan atas Skor Kinerja yang dimiliki oleh pemerintah daerah dengan sedang sebesar 2 yaitu mendapatkan pengungkapan sedang, dan yang paling besar adalah 4 yaitu sangat tinggi, dengan standar deviasi sebesar 0.511.

Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi multikolinieritas, dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai *tolerance* masing-masing variabel. Apabila $VIF > 10$ atau $tolerance < 0.10$ maka terjadi multikolinieritas. Dan bila $VIF < 10$ atau $tolerance > 0.10$ maka tidak terjadi multikolinieritas.

Tabel 2.
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	2,760	,223		12,386	,000		
1 PAD	1,068E-012	,000	,278	1,326	,199	,991	1,009
Temuan	,012	,042	,061	,289	,775	,991	1,009

a. Dependent Variable: KPD

Sumber : Data sekunder yang diolah (2018)

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa nilai *tolerance* masing-masing variabel lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF sebesar lebih kecil dari 10 maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas sehingga memenuhi syarat uji multikolinieritas atau dapat dipercaya dan obyektif.

Hasil perhitungan nilai *tolerance* juga menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0.10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan hal yang sama tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

Case Processing Summary

Case processing summary menyajikan ringkasan data atau kasus yang dianalisis. Pada tabel *case processing summary*, kita dapat melihat seberapa banyak data yang berada pada kategori rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. Selain itu dengan melihat tabel *case processing summary* dapat juga dilihat berapa jumlah data yang valid sebagai berikut :

Tabel 3.

Case Processing Summary
Case Processing Summary

		N	Marginal Percentage
KPD	Sedang	3	12,5%
	Tinggi	18	75,0%
	Sangat Tinggi	3	12,5%
Valid		24	100,0%
Missing		0	
Total		24	

Sumber : Data sekunder yang diolah (2018)

Jumlah sampel adalah 24 pemerintah daerah Se- Provinsi Banten dengan perincian skor kinerja pemerintah daerah. Untuk pengungkapan Sedang = 3 pemerintah daerah dengan persentase 12.5%, dan untuk pengungkapan Tinggi = 18 pemerintah daerah dengan persentase 75%, serta untuk pengungkapan Sangat Tinggi = 3 pemerintah daerah dengan persentase 12.5%. Dengan nilai data yang valid sebesar 100%.

Menilai Model Fit

Menilai model fit pada PLUM dapat dilakukan dengan melihat tabel model fitting information. Model fit ditentukan dengan melihat tabel model *fitting information* dan membandingkan nilai -2 log likelihood pada intercept dengan nilai final nilai setelah dimasukkan variabel independen ke dalam model serta melihat nilai signifikansi.

Model fit jika nilai 2 log likelihood pada final lebih besar dibandingkan dengan nilai *intercept* dan nilai signifikansi < 5%. Jika hal ini terpenuhi berarti model dengan dimasukkan variabel independen, lebih baik dibandingkan hanya model dengan *intercept* saja.

Tabel 4.

Model Fitting Information
Model Fitting Information

Model	-2 Log Likelihood	Chi-Square	Df	Sig.
Intercept Only	35,310			
Final	33,356	1,954	2	,376

Link function: Logit.

Sumber : Data sekunder yang diolah (2018)

Model hanya dengan intercept saja menghasilkan nilai 2loglikelihood 35.310, sedangkan jika variabel independen X1 dan X2 dimasukan kedalam model, maka nilai 2 log Likelihood turun menjadi 33.356 dan penurunan ini signifikan pada 0,376. Hasil ini berarti model dengan *intercept* saja lebih baik dibandingkan variabel independen saja. Jadi dapat disimpulkan bahwa model fit,

Tabel 5.
Goodness-of-Fit
Goodness-of-Fit

	Chi-Square	Df	Sig.
Pearson	41,144	44	,595
Deviance	33,356	44	,879

Link function: Logit.

Sumber : Data sekunder yang diolah (2018)

Goodness-of-fit tidak begitu relevan oleh karena banyak cell yang memiliki frekuensi di atas nol, oleh karena itu dapat diabaikan.

Pseudo R-Square

Pseudo R-Square pada PLUM (*Polytomous Universal Model*), intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. *Pseudo R-Square* mirip koefisien determinasi pada regresi linier. Nilai koefisien *Pseudo R-Square* adalah antara nol dan satu. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen sebagai berikut :

Tabel 6.
Pseudo R-square

Pseudo R-Square	
Cox and Snell	,078
Nagelkerke	,101
McFadden	,055

Link function: Logit

Sumber : Data Sekunder yang Diolah (2018)

Pseudo R-Square menjelaskan variasi Skor Kinerja Pemda yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen X1 dan X2 sebesar 5,5% (nilai McFadden).

Uji *Parallel Lines*

Uji *Parallel Lines* adalah uji untuk menilai asumsi bahwa semua kategori memiliki parameter yang sama atau tidak (Ghozali, 2011). Nilai yang diinginkan adalah tidak signifikan yaitu $p > 0,05$. Jika hasil uji menunjukkan $p < 0,05$ berarti model tidak cocok. Ketidakcocokan ini bisa disebabkan kesalahan dalam membuat peringkat kategori (Ghozali, 2011).

Tabel 7.
Test of Parallel Lines
Test of Parallel Lines^a

Model	-2 Log Likelihood	Chi-Square	Df	Sig.
Null Hypothesis	33,356			
General	27,259	6,097	2	,047

The null hypothesis states that the location parameters (slope coefficients) are the same across response categories.

a. Link function: Logit.

Sumber : Data sekunder yang diolah (2018)

Hasil uji *parallel lines* menunjukkan nilai $p < 0.0000$ yang berarti model tidak cocok. Ketidacakocokan model ini dapat disebabkan karena salah dalam memilih *link function* atau kesalahan dalam membuat peringkat kategori. Untuk itu dapat dilakukan pemodelan kembali dengan memilih *link function* yang lain, misalkan *Complementary log-log* dan berikut ini *output* SPSS dengan *link function Complementary log-log*.

Tabel 8.

Pseudo R-Square

Pseudo R-Square

Cox and Snell	,099
Nagelkerke	,128
McFadden	,071

Link function:

ComplementaryLog-log.

Sumber : Data sekunder yang diolah (2018)

Nilai McFadden mengalami peningkatan menjadi 0.071 (menggunakan *Complementary log-log*).

Tabel 9
Test of Parallel Lines
Test of Parallel Lines^a

Model	-2 Log Likelihood	Chi-Square	Df	Sig.
Null Hypothesis	32,812			
General	27,279 ^b	5,533 ^c	2	,063

The null hypothesis states that the location parameters (slope coefficients) are the same across response categories.

a. Link function: Complementary Log-log.

b. The log-likelihood value cannot be further increased after maximum number of step-halving.

c. The Chi-Square statistic is computed based on the log-likelihood value of the last iteration of the general model.

Validity of the test is uncertain.

Sumber : Data sekunder yang diolah (2018)

Hasil Uji Parallel lines menunjukkan nilai $p > 0.05$ dengan menggunakan *link Complementary Log – log* jadi model sudah sesuai. (*menggunakan Complementary log-log*). Nilai yang diinginkan adalah tidak signifikan yaitu $0.063 > 0.05$, yang berarti nilai sudah sesuai dengan nilai yang diinginkan

Uji Hipotesis

Hasil uji hipotesis dapat dilihat dari *parameter estimates* di mana terdapat pengaruh dari masing-masing variabel terikat. *Parameter estimates* dapat dilihat melalui koefisien regresi. Koefisien regresi dari tiap variabel-variabel yang diuji menunjukkan bentuk hubungan antara variabel yang satu dengan yang lainnya. Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai probabilitas (*sig*).

Apabila terlihat angka signifikan lebih kecil dari 0,05 maka koefisien regresi adalah signifikan pada tingkat 5% maka berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti bahwa variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap terjadinya variabel terikat. Begitu pula sebaliknya, jika angka signifikansi lebih besar dari 0,05 maka berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak, yang berarti bahwa variabel bebas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap terjadinya variabel terikat.

Tabel 10.
Uji Hipotesis
Parameter Estimates

	Estimate	Std. Error	Wald	Df	Sig.	95% Confidence Interval		
						Lower Bound	Upper Bound	
Threshold	[KPD = 2]	-1,269	,725	3,070	1	,080	-2,689	,151
	[KPD = 3]	1,678	,662	6,431	1	,011	,381	2,974
Location	PAD	2,339E-012	2,061E-012	1,288	1	,256	1,701E-012	6,379E-012
	Temuan	,117	,110	1,135	1	,287	-,098	,332

Link function: Complementary Log-log.

Sumber : Data sekunder yang diolah (2018)

Pembahasan

Penelitian ini menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Temuan Audit BPK sebagai variabel independen dan Kinerja Pemerintah Daerah sebagai variabel dependen. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam penelitian ini dijelaskan menggunakan jumlah PAD Nya tiap Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten tahun 2009 – 2012, sedangkan temuan audit BPK menggunakan jumlah temuan audit dibagi total anggaran belanja tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Serta kinerja Pemda menggunakan Skor/Peringkat Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2009 – 2017. Hasil pengujian dalam penelitian ini, hipotesis pertama dan hipotesis kedua dalam penelitian ini dapat di tolak. Penjelasan masing-masing variabel sebagai berikut :

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Pemda Kabupaten/Kota

Hasil uji regresi logistik ordinal hipotesis penelitian ini tidak berpengaruh terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota. Dengan nilai Sig 0.256, yang berarti angka signifikansi lebih besar dari 0,05 maka berarti H0 diterima dan H1 ditolak, yang berarti bahwa variabel bebas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap terjadinya variabel terikat. PAD merupakan salah satu sumber pendanaan yang digunakan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan daerah yang berimplikasi pada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Sumarjo, 2010). Selain itu pendapatan asli daerah (PAD) merupakan tulang punggung pembiayaan daerah untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Pemda dengan ukuran dan kekayaan asli daerah (PAD) yang besar seharusnya memiliki nilai skor kinerja yang tinggi.

Jika Pemda dengan ukuran dan PAD yang besar ternyata memiliki nilai skor yang rendah maka Pemda tersebut harus melakukan evaluasi atas kinerjanya bahwasanya kinerjanya berarti tidak lebih baik dibanding Pemda dengan ukuran dan PAD yang memang lebih kecil. Pemda dengan ukuran dan PAD yang besar dituntut untuk lebih baik dalam mengelola dan memanfaatkan kekayaan yang dimilikinya demi pelayanan kepada masyarakat. Hasil dalam penelitian ini mendukung penelitian Wenny (2012) yang menyimpulkan PAD tidak mempengaruhi kinerja keuangan Pemda. Penelitian Wenny (2012) yang menyimpulkan bahwa PAD secara simultan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan, namun secara parsial hanya lain – lain PAD yang sah yang dominan mempengaruhi kinerja keuangan pemda, sedangkan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil perusahaan dan kekayaan daerah tidak dominan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini tidak mendukung penelitian Mustikarini dan Fitriyasi (2012) yang menyimpulkan bahwa tingkat kekayaan daerah yang diukur melalui nilai PAD terhadap total pendapatan Pemda berpengaruh positif signifikan terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota. Penelitian Sumarjo (2010) yang menyimpulkan *intergovernmental revenue* diukur dengan besarnya PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Pemda .

Pengaruh Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemda Kabupaten/Kota.

Hasil uji regresi logistik ordinal hipotesis penelitian ini tidak berpengaruh terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota. Dengan nilai Sig 0.287, yang artinya angka signifikansi lebih besar dari 0,05 maka berarti H0 diterima dan H1 ditolak, yang berarti bahwa variabel bebas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap terjadinya variabel terikat. Hasil dalam penelitian ini tidak mendukung penelitian Mustikarini dan Fitriyasi (2012) serta Hafidh dan Shiddiq (2013) yang menyimpulkan bahwa temuan audit BPK berpengaruh negatif signifikan terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota serta Nandhya dan Kurniasih (2012) yang menyimpulkan temuan audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Hal ini tidak sejalan dengan hipotesis awal yaitu temuan audit berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah, dikarenakan penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang mengambil sampel keseluruhan Pemda di Indonesia, dan adanya data yang tidak lengkap menyebabkan hasil penelitian tidak sesuai dengan hipotesis di awal serta penelitian ini baru pertama kali dilakukan di Provinsi Banten sehingga belum ada peneliti yang membuktikan bahwa temuan audit berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini berarti Pemda harus lebih berhati-hati dalam masalah pengelolaan keuangan daerah karena hal ini tidak hanya terkait dengan masalah secara akuntansi saja tapi juga terkait dengan kepatuhan terhadap regulasi yang ada.

Kesimpulan

Berdasarkan simpulan yang telah dilakukan sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil dalam penelitian ini untuk variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan temuan audit BPK tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Banten. Jika Pemda dengan ukuran PAD yang besar ternyata memiliki nilai skor yang rendah maka Pemda tersebut harus melakukan evaluasi atas kinerjanya bahwasanya kinerjanya berarti tidak lebih baik dibanding Pemda dengan ukuran dan PAD yang memang lebih kecil. Pemda dengan ukuran dan PAD yang besar dituntut untuk lebih baik dalam mengelola dan memanfaatkan kekayaan yang dimilikinya demi pelayanan kepada masyarakat.

Artinya bahwa Pemda dengan jumlah pendapatan asli daerah yang besar tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerahnya. Sehingga H1 ditolak. Hasil dalam penelitian ini mendukung penelitian Wenny (2012) yang menyimpulkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak mempengaruhi kinerja keuangan Pemda. Penelitian Wenny (2012) yang menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan, namun secara parsial hanya lain – lain PAD yang sah yang dominan mempengaruhi kinerja keuangan pemda, sedangkan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil perusahaan dan kekayaan daerah tidak dominan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

2. Temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diukur dari temuan audit (dalam rupiah) dibagi total anggaran belanja untuk kabupaten/kota di Provinsi Banten tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, Sehingga H2 ditolak. Artinya semakin banyak temuan audit BPK belum tentu kinerja pemerintah daerah tersebut rendah/buruk, yang berarti temuan audit BPK tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di kabupaten/kota di Provinsi Banten, sehingga temuan audit ini tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Banten.

Hal ini dikarenakan penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang mengambil sampel keseluruhan Pemda di Indonesia, dan adanya data yang tidak lengkap menyebabkan hasil penelitian tidak sesuai dengan hipotesis di awal serta penelitian ini baru pertama kali dilakukan di Provinsi Banten sehingga belum ada peneliti yang membuktikan bahwa temuan audit berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini berarti Pemda harus lebih berhati-hati dalam masalah pengelolaan keuangan daerah karena hal ini tidak hanya terkait dengan masalah secara akuntansi saja tapi juga terkait dengan kepatuhan terhadap regulasi yang ada.

Keterbatasan

Dalam penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti. Antara lain sebagai berikut :

1. Sampel penelitian dibatasi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten saja, Namun demikian penelitian ini sudah dilakukan dengan menurut metodologi penelitian yang benar.
2. Variabel independen dalam penelitian ini dibatasi hanya pada pendapatan asli daerah dan temuan audit BPK, sementara itu banyak lagi variabel independen seperti belanja modal, opini audit dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah.
3. Dikarenakan kelengkapan dan kriteria penarikan sampel, maka penelitian hanya dilakukan selama 4 tahun.

Saran

Hasil simpulan diatas menjadi dasar bagi peneliti untuk mengajukan saran bagi pemerintah daerah di Banten khususnya dan pemerintah daerah kabupaten/kota pada umumnya untuk dapat lebih meningkatkan kinerja pemerintah daerahnya. Tidak terdapatnya pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja pemerintah daerah diharapkan pemerintah daerah yang memiliki pendapatan asli daerah yang besar untuk lebih mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah tersebut. Temuan audit BPK tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Sehingga pihak BPK diharapkan dapat lebih rinci dan terarah dalam mengaudit temuan terkait peraturan perundang – undangan terhadap kinerja Pemda agar kinerja pemerintah daerahnya dapat lebih terlihat dari tahun ke tahun. Dengan semakin baik kinerja pemerintah daerah maka pelayanan yang diberikan kepada masyarakat akan semakin baik sehingga akan berdampak terciptanya *good governance*.

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang disampaikan sebelumnya, beberapa saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Akademik

- a) Penelitian mendatang sebaiknya memperluas objek penelitian tidak hanya di Kabupaten/Kota di Banten, agar dapat memperluas sekaligus menambahkan sampel penelitian seperti dari luar Provinsi Banten atau seluruh Indonesia dan/atau dengan menambahkan periode pengamatan.
serta menambah variabel lain yang menyangkut dengan kinerja pemerintah daerah. Seperti belanja modal karena belanja modal biasanya terkait erat dengan penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat.

2. Bagi Pemerintah

- a) Sebaiknya pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten agar lebih transparan dalam pertanggungjawaban Laporan Keuangannya, sehingga masyarakat bisa mengakses laporan APBD.
- b) Pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Banten agar mengoptimalkan penargetan pendapatan asli daerahnya.

REFRENSI

- Adi, Priyo, Hari. 2006. Hubungan antara Pertumbuhan ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan PAD: Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali. *Jurnal SNA 9 Padang*. Hal 2-3.
- Ardhani, Pungky. 2017. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU dan DAK terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal". Program Sarjana. Universitas Diponegoro.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Banten. *Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun 2009-2012*. Diakses tanggal 17 April 2014.
- Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Keuangan Daerah Provinsi Banten. *Laporan Jumlah Pendapatan Asli Daerah tahun 2009-2012*. Diakses tanggal 18 April 2014.
- Ghozali, Imam. 2017. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 19*. Edisi 5. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, dan Abdulah. 2017. *Analisis Varian pendapatan asli daerah dalam laporan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota di Indonesia*. Universitas Gadjah Mada
- Jensen, M dan W. Meckling. 1976. *Theory of the Firm; Managerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure*. *Jurnal of Financial Economics*, 305-360
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- _____ 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Moe, T. M. 1984. *The new economics of organization*. *American Journal of Political Science* 28(5): 739-777.
- Mustikarini, Widya, Astuti dan Fitriasari. 2012. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah: Studi pada Kabupaten/Kota di Indonesia*. *Jurnal Universitas Indonesia*. hal 2-14.
- Nugroho, Fajar. 2012. "Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening". Program Sarjana. Universitas Diponegoro.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2009. *Tentang Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*.
- _____ No. 74 Tahun 2009. *Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Kepada Penyelenggara Pemerintahan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2000. *Tentang Penghasilan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*.
- _____ No. 110 Tahun 2000. *Tentang Mengatur Mengenai Kedudukan Keuangan Anggota Legislatif*.
- _____ No. 24 Tahun 2004. *Tentang Mengatur Mengenai Kedudukan Keuangan Anggota Legislatif*.
- _____ No. 37 Tahun 2005. *Tentang Mengatur Mengenai Kedudukan Keuangan Anggota Legislatif*
- _____ No. 13 Tahun 2006. *Tentang Belanja Sebagai Kewajiban Pemerintah Daerah Yang diakui Sebagai Pengurang Nilai Kekayaan Bersih*.
- _____ No. 3 Tahun 2007. *Tentang LPPD kepada Pemerintah*.
- _____ No. 38 Tahun 2007. *Tentang Retribusi Daerah*.
- _____ No. 6 Tahun 2008. *Tentang EKPPD*.
- _____ No. 73 Tahun 2009. *Tentang Cara Pelaksanaan EKPPD*.

- No. 69 Tahun 2010. *Tentang Pajak Daerah.*
- No. 27 Tahun 2013. *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- Sagay, Brian. 2013. *Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja. Studi pada Kabupaten Minahasa Selatan.* Jurnal ISSN 2303-1174. Hal 2-5.
- Setiawan, Wahyu. 2012. *Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia.* Skripsi Sarjana. Universitas Diponegoro. Semarang
- Sumarjo, Hendro. 2010. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia.* Skripsi Sarjana. Universitas Sebelas Maret. Surakarta
- TAP MPR No. XV/MPR/1998. *Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah.*
- Undang-undang No. 22 Tahun 1999. *Tentang Mengatur Bagaimana Hubungan antara Eksekutif dan Legislatif.*
- No. 34 Tahun 2000. *Tentang Perubahan atas Undang-undang No.18 Tahun1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*
- No. 17 Tahun 2003. *Tentang Keuangan Negara.*
- No. 1 Tahun 2004. *Tentang Perbendaharaan Negara.*
- No. 15 Tahun 2004. *Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.*
- No. 32 Tahun 2004. *Tentang Pemerintah Daerah.*
- No. 33 Tahun 2004. *Tentang PAD.*
- No. 28 Tahun 2009. *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*
- Wenny, Cherrya, Dhia. 2015. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan: Studi pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Selatan.* *Jurnal Ilmiah STIE MDP.* Hal 2-5.

